

JURNAL

**PENERAPAN PRINSIP *FAIR USE* DALAM HAK CIPTA TERKAIT
DENGAN KEBIJAKAN PERBANYAKAN BUKU DI PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN AUSTRALIA)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Retno Sari Widowati

115010107111047



Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Brawijaya

Fakultas Hukum

Malang

2015

**PENERAPAN PRINSIP *FAIR USE* DALAM HAK CIPTA TERKAIT
DENGAN KEBIJAKAN PERBANYAKAN BUKU DI PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI**

**(STUDI PERBANDINGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN AUSTRALIA)**

**Retno Sari Widowati, Sentot P. Sigito, SH., M. Hum., M. Zairul Alam, SH.,
MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : retnosari.widowati@ymail.com

ABSTRAK

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dirasa masih kurang memberikan peraturan yang tegas atas kebijakan Hak Cipta atau *Copyright policy* di setiap perpustakaan di Indonesia, sehingga terjadinya kekosongan hukum mengenai prinsip *Fair Use* atas kebijakan perbanyakan buku di beberapa perpustakaan perguruan tinggi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis bentuk peraturan hukum mengenai prinsip *Fair Use* dalam Hak Cipta terkait dengan kebijakan perbanyakan buku di perpustakaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Australian *Copyright Act*. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan yang ada dan difokuskan terhadap penggunaan yang wajar dalam tindakan perbanyakan karya ciptaan pada perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil perbandingan itu sendiri terdapat persamaan dan perbandingan hukum. Salah satu persamaannya adalah kedua kebijakan perbanyakan buku antara Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia dari aturan tentang layanan hal yang dapat disalin yaitu sama-sama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan bahan mengajar. Sedangkan perbedaan yaitu di Indonesia belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pembatasan-pembatasan karya cipta pada perpustakaan sehingga di perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sehingga untuk memperlanyakan buku tidak terdapat batasan, yang mana pada perpustakaan perguruan tinggi di Australia yaitu segala bentuk referensi maksimal 5 halaman yang dapat disalin dan di negara ini sudah terdapat kebijakan pembatasan karya cipta di perpustakaan tersebut. Sebenarnya, Penerapan prinsip *Fair use* ini harus didukung oleh pelaksanaan dari pasal 40 UUHC tersebut. Apabila ketentuan dari pasal 40 ini tidak berjalan dalam peraturan-peraturan dibawahnya, maka apa yang diharapkan dari pasal 40 ini dalam pelaksanaan prinsip *Fair Use* tidak akan tercapai. Karena Undang-Undang hak cipta itu sendiri belum memiliki peraturan yang jelas/masih kabur mengenai prinsip *Fair Use*.

Kata kunci: Prinsip *Fair Use*, kebijakan perbanyakan buku, perpustakaan perguruan tinggi

ABSTRACT

The act of copyright no. 19 year 2002 that has been converted into law no.28 year 2014 is still lacking give strict regulation of the policy copyright or copyright policy in every library in indonesia so that the occurrence of emptiness law concerning the principle of fair use of the policy making copies of some books in library college. Purpose in this research namely to know finding, and analyze the form of regulation law concerning the principle of fair use in copyright associated with the policy of making copies of books in a library in accordance with the provisions of the law number 28 year 2014 about copyright and the Australian copyright act. The methods used, and normative juridical it is the norm that there is a law which is based on the rule of law and focus on the use of normal perbanyakan in the act of creation in the library. The approaches used in this research are the regulations and the next. Based on the results of research conducted by the conclusion that the outcome of the agreement itself, but the law is. One of the equation is the second policy making copies of books between college library in indonesia and australia from the rules about the things that can be copied is equally to the interests of education, research, and teaching materials. While differences in indonesia is the absence of legislation that specifically regulates the work of copyright restrictions on the library so that in the library college in indonesia so as to memperbanyak book there are no limits, which in the library college in australia that is all forms of reference maximum of 5 a page that can be copied and in this country there have been the limitation of the work of copyright in the library. Actually, the application of the principle of fair use this must be supported by the implementation of article 40 uuHC. If the provisions of article 40 these ordinances, then walk in it then what is expected of article 40 in the implementation of the principle of fair use not be achieved. The legislation itself not have copyright legislation clearly - is vague about the principle of fair use

Keyword: The principle of fair use, policy making copies of the book, a college library

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap karya tulis dari tindakan perbanyakan sudah dilakukan sejak dahulu kala pada abad ke-17. Aturan tersebut dikeluarkan oleh parlemen Inggris yang bernama "*The Statue Of Anne*" yang membawa dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kedudukan pencipta yang menciptakan suatu karya tulis berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan tersebut berfungsi untuk melindungi karya ciptaan dari tindakan perbanyakan cetakan tanpa izin.

Yang dimaksud karya tulis disini yang mencakup setiap pekerjaan selain dari pekerjaan musik (lirik lagu) ataupun drama (naskah) yang tertulis, lisan, maupun berupa nyanyian, dan juga karya yang berupa sebuah tabel, program komputer, atau desain yang disiapkan untuk sebuah program komputer atau sebuah sumber data.¹

Karya tulis tentunya sangat dibutuhkan sebagai referensi dan sumber pengetahuan. Biasanya, karya tulis tersebut disimpan dan dapat kita temukan di perpustakaan. Salah satu fungsi Perpustakaan yaitu memberikan informasi kepada pembaca yang akan mengadakan penelitian, untuk selanjutnya pustaka tersebut memberikan pelayanan terhadap pemberian informasi dan referensi guna menunjang pembuatan penelitian tersebut. Maka dari itu, fungsi perpustakaan sangat lah penting bagi kegiatan akademis, salah satunya di lingkungan perpustakaan Perguruan tinggi yang berfungsi menyediakan dan menyebarluaskan informasi guna membantu perguruan tinggi tersebut mencapai tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi ini dilindungi oleh Undang-undang Hak cipta. Hak cipta merupakan bagian dari Hukum kekayaan intelektual yang mengatur berbagai ragam ciptaan antara lain seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Hal ini diatur dalam pasal 12 UU Hak cipta No. 28 Tahun 2014 mengenai jenis-jenis ciptaan yang telah diubah dengan

¹ University of London Press v. University Tutorial Press [1916] 2 Ch 601.

ketentuan pasal 40 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014² (yang selanjutnya disebut dengan UUHC). Dalam setiap perlindungan hak cipta terdapat aturan perkecualian dan batasan terhadap hak eksklusif yang sering kita sebut dengan istilah *Fair use*. Prinsip ini memiliki pengertian apabila seseorang yang ingin mengambil karya seseorang dalam hal kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah.

Ciptaan memiliki pengertian yaitu hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.³ Ciptaan disini merupakan referensi pada perpustakaan baik berupa buku, jurnal, naskah, dokumen-dokumen penting, dan karya tulis lainnya. Maka dari itu, diperlukan aturan-aturan secara khusus mengenai kebijakan Hak Cipta atau *Copyright Policy* di setiap perpustakaan di Indonesia yang sudah diterapkan di berbagai negara guna tidak hanya melindungi para praktisi dan akademisi dalam memperoleh informasi dan referensi, tetapi juga pemilik hak cipta buku-buku dan karya-karya tersebut.

2. Permasalahan

Adapun Rumusan masalah dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum terkait dengan kebijakan perbanyakan buku antara beberapa perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dan Australia menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 dan Australian *Copyright Act*?
2. Bagaimana bentuk penerapan Prinsip *Fair use* dalam hak cipta tentang kebijakan perbanyakan buku di perpustakaan perguruan tinggi terkait dengan pasal 40 ayat (1) UUHC No. 28 Tahun 2014?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan yang ada dan difokuskan terhadap penggunaan yang

² Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&task=detail&id=404271&catid=1&tahun=2014&catname=UU (online) diakses pada tanggal 18 November 2014.

³ Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

wajar dalam tindakan perbanyak karya ciptaan pada perpustakaan. Dalam ilmu hukum terdapat dua macam penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, sedangkan paradigma penelitian ini menggunakan *Comparative Approach* atau Penelitian Perbandingan Hukum.⁴ Menurut tujuannya adalah digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang berbeda di masyarakat.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Dalam karya ilmiah ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sedangkan dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, beberapa yang termasuk dalam jenis bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan No 37 tahun 2012;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- e. Berne Convention for Protection of Literary & Artistic Works;
- f. Australia Copyright Council;
- g. WIPO Copyright Treaty;
- h. United State Copyright ACT 1976.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, hasil

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm 42.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

penelusuran ilmiah, hasil wawancara dengan narasumber (apabila dimungkinkan). Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (Black Law).

Tenik penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atas bahan hukum yang diperlukan yang kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasi untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum sebagaimana dimaksud diatas diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang berupa buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal, skripsi, thesis, artikel terkait, dan juga dokumen yang berasal dari internet.

Dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan secara kualitatif mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Analisa ini bermanfaat untuk mencari persamaan maupun perbedaan dalam masing-masing perpustakaan sesuai dengan prinsip *Fair Use* yang ada di Indonesia maupun Australia.

4. Pembahasan

A. Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Dengan Kebijakan Perbanyakan Buku Antara Beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia

1) Kebijakan Perbanyakan Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa buku merupakan salah satu yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena tidak mungkin di

antara beberapa ciptaan termasuk buku terdapat kesamaan yang mutlak.

Maksud dari kesamaan yang mutlak, bisa jadi buku tersebut merupakan hasil dari plagiasi. Sebuah buku dapat dikatakan plagiasi apabila buku tersebut bersumber dari referensi-referensi dengan mana penulis tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas darimana sumber tersebut berasal. Jadi, kesamaan yang mutlak tidak terdapat pada Pasal 1 ayat 12. Karena hal tersebut menjelaskan mengenai tindakan penggandaan/perbanyak bahwa hal tersebut merupakan proses, pembuatan, atau cara menggandakan salinan ciptaan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.

Sedangkan kesamaan yang tidak mutlak disini ada beberapa kemungkinan, bisa saja bahwa seorang penulis buku mengambil referensi dari buku-buku sebagai sumber referensi yang berbeda tetapi dengan menyebutkan sumbernya, hal itu dapat dikatakan sama tetapi tidak seluruhnya karena mereka mencantumkan sumber rujukan dari asal mula penulis menulis buku tersebut.

Perubahan atas undang-undang diatas dirasa dapat meningkatkan perlindungan terhadap pemilik hak cipta, dan juga untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemilik hak cipta.⁶ Karena UUHC yang lama masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan undang-undang terbaru ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar dapat semakin menggali potensi royalti berupa buku, musik, film, dan hak cipta lainnya secara optimal.

1) Pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 37 Tahun 2012⁷ yang selanjutnya diturunkan ke dalam setiap

⁶ DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541828f96c17c/dpr-setujui-ruu-hak-cipta-jadi-uu> (online), di akses pada tanggal 20 Januari 2015

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Pasal 1.

Universitas tepatnya kepada Peraturan Rektor. Pada kebijakan masing-masing Peraturan Rektor yang turun menjadi peraturan Organisasi dan Tata Kerja, diharapkan terdapat poin-poin yang mengatur tentang Perpustakaan.

2) Organisasi dan Tata Kerja pada Perguruan Tinggi

a. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya diatur di dalam Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006. Dalam Pasal 76-79 bab tentang Perpustakaan. Kebijakan pelayanan perpustakaan Universitas Brawijaya terdiri dari:

- a) Pengunjung dan Peminjam
- b) Syarat-syarat peminjaman
- c) Ketentuan-ketentuan peminjaman

b. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga

Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga ini, perpustakaan dijelaskan dalam Pasal 106 yang mana pada ayat (1) menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan kepastakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Kebijakan pelayanan perpustakaan Universitas Airlangga terdiri dari:

- a) Tata terbit prosedur peminjaman buku
- b) Sanksi dan Denda Buku

Dapat disimpulkan bahwa dari Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga yang sama-sama memiliki peraturan dari Rektor tidak ada dalam kebijakan secara tegas tentang hal perbanyak karya cipta. Hanya menjabarkan dan menjelaskan mengenai tata tertib peminjaman buku dengan sanksi dendanya, tidak

ada secara spesifik yang memberikan aturan secara tegas terkait dengan perbanyakan karya cipta. Kemungkinan aturan-aturan yang digunakan berasal dari aturan kebijakan masing-masing Perpustakaan tersebut.

4) Kebijakan Perbanyakan Buku di Negara Australia

Saat ini sebuah ide atau konsep yang bersifat tertulis maupun dalam media elektronik, keduanya secara otomatis dilindungi oleh Hak Cipta. Karena hal tersebut di Australia tidak terdapat catatan resmi atau proses untuk perlindungan Hak Cipta. Seperti buku-buku, surat kabar, majalah, film, karya seni musik, dan rekaman suara. Semuanya secara yuridis dilindungi oleh hak cipta.

Pada awalnya, hak cipta dibuat untuk melindungi antara lain:⁸

- a. Ketikan sebuah catatan;
- b. Pengaturan database;
- c. Media siaran;
- d. Program komputer;
- e. Jurnal akademik atau Kompilasi CD.

Perlindungan Hak Cipta sudah diatur melalui undang-undang tahun 1968 dan juga secara otomatis memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Disini, hukum Hak Cipta berbeda dengan di Indonesia karena harus ada sebuah perjanjian untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak cipta yang bersifat internasional.

Perpustakaan pada Universitas Wollongong memiliki beberapa bentuk perlindungan yang sangat ketat pada perpustakaan, seperti Kebijakan Hak Cipta perpustakaan, *Copyright Basic*, dan Aturan Kode Etik perpustakaan.

Kebijakan Hak Cipta disini terbagi dalam beberapa poin lagi, antara lain:⁹

⁸ Australian Government, IP Australia-Copyright, <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/copyright/> (online), di akses pada tanggal 1 Desember 2014

⁹ Policies University of Wollongong, <http://www.library.uow.edu.au/copyright/policies/UOW026670.html> (online), di akses pada tanggal 1 Desember 2014

- 1) Tujuan dari Kebijakan:
- 2) Beberapa pengecualian atau Kondisi tertentu

Sedangkan dasar Hak Cipta dari peraturan perpustakaan di UOW menjelaskan bahan yang dapat disalin untuk kepentingan:¹⁰

- a) Studi atau penelitian;
- b) Kritik atau tinjauan;
- c) Parodi atau satir;
- d) Bahan pengajaran.

Terdapat syarat dan aturan bahwa kita tidak bisa menyalin atau mengkopi apabila:¹¹ di dalam undang-undang Hak Cipta yang memungkinkan untuk menyalin waktu, ruang, tujuan format yang bergeser. Namun, apabila, seluruh staf dan mahasiswa dilarang secara tegas untuk menggunakan infrastruktur untuk menyalin atau berkomunikasi materi untuk tujuan hiburan.

Aturan Kode Etik Perpustakaan disini berlaku untuk perilaku dari layanan Perpustakaan Universitas. Mahasiswa atau pihak yang menggunakan fasilitas perpustakaan wajib untuk menghormati dan memenuhi persyaratan yang sesuai untuk keperluan studi maupun penelitian.

Kondisi dari tujuan kode etik:¹²

- a) Semua pengguna memiliki hak untuk mengakses layanan dan fasilitas Perpustakaan Universitas tanpa gangguan;
- b) Untuk akses ketertiban kampus, harus membawa kartu identitas selama berada di area universitas;
- c) makanan, minuman tanpa tutup, dan barang-barang yang mudah terbakar;

¹⁰ Copyright University of Wollongong,
<http://www.library.uow.edu.au/copyright/UOW026674.html> (online), di akses pada tanggal 4 Desember 2014

¹¹ *Ibid*

¹² Policy Directory University of Wollongong,
<http://www.uow.edu.au/about/policy/UOW026916.html> (online), di akses pada 4 Desember 2014

5) Perbandingan Tentang Kebijakan Perpustakaan Indonesia dan Australia

a. Perbandingan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia

Setiap Perguruan Tinggi memiliki pengaturan yang berbeda mengenai perpustakaan, ada beberapa perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua negara ini, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia

Aturan Tentang Layanan	Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia	Perpustakaan Perguruan Tinggi di Australia
Hal yang dapat disalin	Seluruh koleksi referensi di perpustakaan seperti Laporan penelitian, Skripsi. Pihak yang ingin menyalin harus meninggalkan kartu mahasiswa atau kartu pengenalan.	Untuk kepentingan : a. Studi atau penelitian; b. Kritik atau tinjauan; c. Parodi; d. Bahan-bahan pengajaran
Batasan untuk menyalin	Tidak ada batasan menyalin untuk buku, kecuali skripsi hanya di perbolehkan bab 1 dan bab 2	Dalam ketentuan UOW ini, segala bentuk sumber referensi maksimal 5 halaman yang dapat disalin
Kode Etik Perpustakaan	<p>b. Mahasiswa yang ingin meminjam buku wajib untuk datang sendiri (tidak bisa diwakilkan)</p> <p>c. Menunjukkan kartu mahasiswa yang berlaku</p> <p>d. Meminjamkan koleksi maksimal 5 buku (judul berbeda) selama jangka waktu peminjaman yaitu 2 minggu</p>	<p>a. Semua pihak memiliki hak untuk mengakses layanan dan fasilitas perpustakaan harus membawa kartu identitas selama berada di area universitas</p> <p>b. Dilarang untuk merokok di area Perpustakaan</p> <p>c. Membawa hewan tidak diizinkan di dalam perpustakaan kecuali hewan pemandu untuk pendengaran visual</p> <p>d. Berbicara tidak diizinkan di daerah ruang membaca, kecuali percakapan yang tenang dengan tujuan mencari bantuan dalam penggunaan katalog.</p>

Dari tabel diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang berbeda, dari perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia tidak ada pengecualian, seluruh koleksi dapat di salin. Sedangkan di perpustakaan perguruan tinggi Australia, hal yang dapat di salin yaitu untuk kepentingan tertentu seperti kepentingan pendidikan, penelitian, parodi, dan sebagai bahan-bahan pengajaran. Perbedaan pada batasan untuk menyalin, di Indonesia tidak terdapat batasan menyalin, tetapi biasanya jasa untuk menyalin di dalam perpustakaan harganya lebih mahal sehingga banyak yang meminjam lalu disalin di luar perpustakaan, berbeda dengan Australia tepatnya Universitas Wollongong, di UOW terdapat batasan maksimal yaitu 5 halaman saja, jika para pihak yang secara tidak sengaja diketahui menyalin lebih dari 5 halaman maka seluruh dari salinan tersebut akan dirobek-robek.

Untuk poin ketiga yaitu kode etik di Indonesia masih sangat jauh berbeda dengan negara Australia, di Indonesia kode etik hanya sebatas ketertiban tentang pihak yang memasuki dan meminjam buku di perpustakaan, sedangkan di Australia kode etik jauh lebih detail, dilarang merokok ataupun membawa hewan juga disebutkan di dalam aturan tersebut.

B. Bentuk Penerapan Prinsip *Fair use* Dalam Hak Cipta Tentang Kebijakan Perbanyak Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi Terkait Dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

1) Pengaturan Prinsip *Fair use* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai Pembatasan Hak Cipta dari penggunaan Prinsip *Fair use* yang tepatnya ada pada ketentuan Pasal 43-51. Berdasarkan Pasal 43 bahwa apabila seseorang yang ingin mengutip atau memperbanyak karya tulis, penyebutan atau

pencantuman sumber ciptaan harus disebutkan secara jelas dan lengkap, dengan kata lain paling tidak harus menyebutkan nama pencipta, judul nama dari karya cipta, dan nama penerbit.¹³

Kemudian pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002 yaitu mengenai Perpustakaan, dalam undang-undang terbaru, perpustakaan termasuk dalam pembatasan hak cipta yang disebutkan bahwa suatu perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, sehingga apabila para siswa ingin memfotokopi untuk kebutuhan dengan syarat kepentingan pendidikan maupun penelitian diperbolehkan

2) Bentuk Penerapan Prinsip *Fair use* Dalam Hak Cipta Tentang Kebijakan Perbanyak Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, tepatnya pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 tentang koleksi perpustakaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan disini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu jenisnya berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang tentunya memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Jadi, koleksi perpustakaan digunakan sebagai koleksi bahan-bahan yang ditata dengan cara tertentu untuk dimanfaatkan.¹⁴ Untuk melindungi koleksi berbentuk digital tersebut dari pelanggaran hak cipta, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip tentang aturan sumber-sumber koleksi digital perpustakaan yang dikatakan oleh Pendit pada bukunya yang

¹³ www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/indonesia_copyright.pdf

¹⁴ Encyclopedia of Information and Library Science, <http://api.ning.com/files/svxrPsACIWqmE1PzC8D2fZJ1uEMb6nnJj2EWUh3mcscUb45GWY6GK6a-2P5zrsY6yuB7Io4jhBeBI3XKM4oxjhl1Iq5drIT2/encyclopediaoflis.pdf>, hlm 371

berjudul Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia yaitu menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip atau kaedah antara lain:¹⁵

- a. Privasi
- b. Properti
- c. Akurasi
- d. Hak Akses

5. Penutupan

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Dengan Kebijakan Perbanyakkan Buku Antara Beberapa Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia :

Bahwa dari perbandingan hukum dapat kita temukan persamaan dan perbedaan, persamaan dari kedua kebijakan perbanyakkan buku antara Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia dari aturan tentang layanan hal yang dapat disalin yaitu sama-sama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan bahan mengajar. Dari aturan tentang layanan kode etik perpustakaan yaitu sama-sama harus membawa/menunjukkan kartu mahasiswa yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan.

Sedangkan perbedaan yaitu di Indonesia belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pembatasan-pembatasan karya cipta pada perpustakaan sehingga di perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sehingga untuk mempernanyak buku tidak terdapat batasan, yang mana pada perpustakaan perguruan tinggi di Australia yaitu segala bentuk referensi maksimal 5 halaman yang dapat disalin dan di negara ini sudah terdapat kebijakan pembatasan karya cipta di perpustakaan tersebut.

¹⁵ Pendit, Putu Laxman, **Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia**, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2007, hlm. 166

2. Bentuk penerapan Prinsip *Fair use* dalam Hak Cipta Tentang Kebijakan Perbanyakkan Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi Terkait dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

Buku dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi, disini buku telah dianggap memenuhi standart of *copyright ability* karena buku apabila didefinisikan merupakan sebuah ide serta kreativitas penulis yang dituangkan ke dalam sekumpulan kertas sebagai media yang kemudian dimodifikasi menjadi sebuah buku. Penerapan prinsip Fair use ini harus didukung oleh pelaksanaan dari pasal 40 UUHC tersebut. Apabila ketentuan dari pasal 40 ini tidak berjalan dalam peraturan-peraturan dibawahnya, maka apa yang diharapkan dari pasal 40 ini dalam pelaksanaan prinsip *Fair Use* tidak akan tercapai. Karena Undang-Undang hak cipta itu sendiri belum memiliki peraturan yang jelas/masih kabur mengenai prinsip *Fair Use*.

b. Saran

1. Dari Undang-Undang Hak Cipta sendiri harus dijabarkan secara jelas mengenai penerapan di Perpustakaan, terutama di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Sehingga terlihat jelas hal-hal yang melanggar ataupun hal-hal yang boleh dilakukan.
2. Seharusnya pemerintah harus benar-benar kritis dan fokus dalam mengeluarkan peraturan dan tata cara mengenai kebijakan perbanyakkan ini khususnya pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, agar aturan-aturan yang akan diterapkan nantinya dapat memberikan perlindungan yang berimbang.
3. Seharusnya Organisasi dan Tata Kerja setiap Perpustakaan memberikan pengertian pembatasan yang wajar pada tiap-tiap aturan Perpustakaan di Perguruan Tinggi, hal tersebut akan mempengaruhi kedisiplinan para pengunjung.

6. Daftar Pustaka

Buku:

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm 42.

David I Bainbridge, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Barrister, Reader in Law, Aston Business School, Aston University, 1999.

John Feather and Paul Sturges, *International Encyclopedia of Information and Library Science*, second edition, Routledge, 2003

Pendit, Putu Laxman, *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2007.

Internet:

Anonim, 2015, DPR Setujui RUU Hak Cipta Jadi UU, (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541828f96c17c/dpr-setujui-ruu-hak-cipta-jadi-uu> (20 Januari 2015)

Australian Government, IP-Australia-Copyright, (online), <http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/copyright/> (1 Desember 2014)

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (online), http://www.setneg.go.id//index.php?option=com_perundangan&task=detail&id=404271&catid=1&tahun=2014&catname=UU (18 November 2014)

Policies University of Wollongong, (online), <http://www.library.uow.edu.au/copyright/policies/UOW026670.html>, (1 Desember 2014)

Copyright University of Wollongong, (online), <http://www.library.uow.edu.au/copyright/UOW026674.html>, (4 Desember 2014)